

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) di Universitas X, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi mahasiswa merupakan suatu proses yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika tata kelola, hubungan kelembagaan, serta proses pembelajaran yang dialami pengurus organisasi mahasiswa. Perubahan tata kelola yang terjadi setelah penerapan PTN-BH mendorong organisasi mahasiswa menjalankan pengelolaan keuangan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertama, pengalaman pengurus organisasi mahasiswa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana organisasi pada PTN-BH di Universitas X yang bersifat formal dan terstruktur dirasakan sebagai pengalaman yang penuh tuntutan dan tanggung jawab. Pengurus merasakan adanya tekanan untuk menjalankan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara tepat karena kesalahan yang terjadi dapat berdampak pada proses administrasi yang harus mereka selesaikan. Sebagian pengurus juga merasakan kebingungan pada awal menjalankan tugas karena harus memahami berbagai persyaratan dan ketentuan yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Tuntutan untuk bekerja secara teliti dan hati-hati membuat pengurus sering merasa khawatir melakukan kesalahan dalam pengelolaan maupun pelaporan keuangan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan beban tanggung jawab yang cukup besar karena harus mengelola dana organisasi secara baik di tengah berbagai kegiatan yang sedang berjalan. Secara keseluruhan, pengalaman mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan organisasi lebih banyak dirasakan sebagai proses yang menuntut kehati-hatian, kesabaran, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan untuk menghadapi berbagai

tuntutan yang melekat dalam tata kelola keuangan organisasi di lingkungan PTN-BH.

Kedua, praktik akuntabilitas keuangan dijalankan melalui berbagai mekanisme formal yang telah diterapkan oleh universitas, seperti penyusunan anggaran kegiatan, penggunaan bukti transaksi yang sah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi persyaratan pencairan dana atau penyelesaian kegiatan, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada organisasi mahasiswa. Pengurus memandang bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dijelaskan, dibuktikan, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada kepatuhan terhadap administrasi semata, melainkan berkembang menjadi kesadaran mengenai pentingnya transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan organisasi. Akuntabilitas menjadi nilai yang tidak hanya dijalankan karena adanya tuntutan prosedural, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran substantif mengenai pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Ketiga, praktik akuntabilitas keuangan memperlihatkan adanya dinamika hubungan keagenan yang muncul antara universitas sebagai pihak yang menyediakan sumber daya dan organisasi mahasiswa sebagai pihak yang menerima mandat untuk mengelola dana tersebut. Hubungan tersebut mendorong lahirnya berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian guna memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya asimetri informasi yang muncul akibat perbedaan tingkat pemahaman mengenai aturan dan prosedur administrasi, baik antara universitas dan organisasi, maupun di dalam organisasi mahasiswa itu sendiri. Selain itu, muncul juga *agency cost* dalam bentuk tambahan waktu, tenaga, dan sumber daya yang harus dikeluarkan oleh pengurus untuk memenuhi berbagai tuntutan administrasi dan pelaporan. Dalam hal ini, praktik akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian tetapi juga mencerminkan

dinamika hubungan *principal* dan *agent* yang melekat dalam tata kelola keuangan organisasi mahasiswa pada lingkungan PTN-BH.

Keempat, praktik akuntabilitas keuangan berperan sebagai sarana pembelajaran dan pembentukan kapasitas pengurus organisasi mahasiswa. Tuntutan untuk menyusun anggaran, mengelola penggunaan dana, membuat laporan keuangan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan mendorong pengurus untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang sebelumnya belum dimiliki. Proses tersebut berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan, kemampuan menyusun dan mengelola anggaran, keterampilan administrasi, kemampuan koordinasi, serta pemahaman mengenai nilai tanggung jawab dan integritas dalam pengelolaan dana organisasi. Pengalaman menghadapi berbagai tuntutan administrasi juga mendorong pengurus untuk beradaptasi, menyelesaikan permasalahan, dan mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi. Oleh karena itu, praktik akuntabilitas tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi proses yang membentuk kapasitas pengurus dalam menjalankan tata kelola organisasi secara lebih bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa pada PTN-BH memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan. Praktik tersebut menjadi bagian tata kelola organisasi yang mempertemukan kepentingan universitas dan organisasi mahasiswa melalui hubungan keagenan, sekaligus menjadi mekanisme yang mendorong terbentuknya kemampuan, pengalaman, serta karakter pengurus organisasi mahasiswa. Melalui proses tersebut, pengurus tidak hanya belajar memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga mengembangkan pemahaman mengenai tanggung jawab, integritas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola organisasi.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pertama, penggunaan pendekatan fenomenologi menyebabkan temuan penelitian sangat bergantung pada pengalaman dan pemaknaan subjektif informan yang

mereka alami. Kedua hasil penelitian hanya menggambarkan praktik akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa pada PTN-BH di Universitas X dari perspektif pengalaman pengurus organisasi mahasiswa dan pihak terkait dalam satu konteks institusi. Praktik akuntabilitas yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat menunjukkan gambaran yang sama pada perguruan tinggi lain yang juga berstatus PTN-BH, mengingat adanya perbedaan kebijakan, sistem pengelolaan keuangan, serta dinamika organisasi di masing-masing perguruan tinggi.

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menganalisis praktik akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa secara lebih luas dengan melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi, serta mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik akuntabilitas keuangan dalam konteks PTN-BH. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan institusional dengan praktik akuntabilitas yang dijalankan oleh organisasi mahasiswa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa.

